



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES
KOMISI VIII DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 15-19 APRIL 2022**



**Sekretariat Komisi VIII DPR RI
Set_komisi8@dpr.go.id**

**JAKARTA
TAHUN 2022
DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI

JADWAL DAN TIM KUNJUNGAN KERJA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

BAB III TEMUAN DAN REKOMENDASI

BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP

**DAFTAR NAMA ANGGOTA
TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 15-19 APRIL 2022**

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
UR UT	AN GG				
1.	289	DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	Ketua Tim	GOL KAR	JABAR II
2.	225	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	Anggota	PDIP	BANTEN I
3.	257	Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd	Anggota	PDIP	SULSEL II
4.	211	UMAR BASHOR, S.E.	Anggota	PDIP	JATIM IV
5.	255	MATINDAS J. RUMAMBI, S.Sos.	Anggota	PDIP	SUL TENG
6.	323	MUHAMMAD ALI RIDHA	Anggota	GOL KAR	JATIM XI
7.	280	MOHAMMAD SALEH, S.E.	Anggota	GOL KAR	BENG KULU
8.	062	M. HUSNI, S.E., M.M.	Anggota	GERIN DRA	SUMUT I

9.	125	Drs. H. SAIFUL RASYID, M.M.	Anggota	GERIN DRA	KALSEL I
10.	564	Dr. IR. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.	Anggota	DEMO KRAT	NTB II
11.	552	WASTAM, SE., SH.	Anggota	DEMO KRAT	JATENG VIII
12.	413	H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	Anggota	PKS	SUMUT II
13.	-	AGUS WIDIJATMOKO, S.H.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
14.	-	DICKY RACHMADI, S.A.P.	SEKRETARIAT KOMISI VIII		
15.	-	MOHAMMAD HASYIM, S.S., M.Si.	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
16.	-	ANTON SYAFRIUNI, S.IP. ,M.IP.	TENAGA AHLI KOMISI VIII		
17.	-	SITI NADIAH	BAGIAN PEMBERITAAN		
18.	-	INAH ROFIKHOH	PERSIDANGAN I		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 telah membentuk Tim Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

B. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 98 Ayat (4) huruf f. tentang Tugas Komisi di Bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2020 tentang Tata Tertib:

- a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
- b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan; dan
- c. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada Masa Reses.

4. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana.
- b. Melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Tujuan

- a. Secara umum untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana di daerah.
- b. Secara khusus untuk memperoleh informasi mengenai kinerja Kanwil Kemenag Provinsi

Kalimantan Timur, Dinas Sosial Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

D. Obyek Kunjungan Kerja

Obyek Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 adalah melakukan pertemuan di Kantor Walikota Balikpapan yang dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala UPT. Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, dihadiri pula oleh pejabat dari Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia.

BAB II

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. PERTEMUAN DENGAN MITRA KERJA

Pelaksanaan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 dilaksanakan bertempat di Balaikota Balikpapan. Turut hadir pada kunjungan ini adalah mitra kerja Komisi VIII DPR RI Yakni: Kepala Kantor Kementerian Agama RI Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan. Turut mendampingi Komisi VIII DPR RI adalah perwakilan dari mitra kerja, yaitu: perwakilan dari Kementerian Agama RI (Plt. Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI), Kepala Balai Besar Kartini Temanggung Kemensos RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Asdep Pengarusutamaan Gender

Bidang Politik dan Hukum), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di hadiri oleh Direktur Logistik dan Peralatan, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain dari unsur mitra kerja, kegiatan kunjungan kerja reses juga di hadiri oleh Asisten Satu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan PJ Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.

Dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan memberikan apresiasi dan respons yang positif terhadap pilihan kunjungan reses ke Kalimantan Timur, Khususnya ke Kota Balikpapan. Dalam *opening speech* nya, Asisten Satu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa kehidupan umat beragama saat ini dalam keadaan kondusif, rukun dan damai. Tidak di temukan konflik-konflik yang bersifat sara maupun golongan. Terutama pada bulan Suci Ramadhan pelaksanaan ibadah semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari sebutan Provinsi Kalimantan Timur sebagai “Indonesia Mini” yang majemuk namun tetap bersatu padu.

Paparan selanjutnya adalah sambutan dan arahan ketua tim rombongan kunjungan kerja sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Bapak. Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. Dalam sambutannya, di jelaskan bahwa kunjungan kerja komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur merupakan amanat dan perintah UU Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi Dewan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Berdasarkan intruksi UU tersebut komisi VIII DPR RI menetapkan daerah tujuan kunjungan kerja reses ke Kalimantan Timur, DIY dan Kepulauan Riau. Ketiga daerah kunjunga kerja reses tersebut telah di putuskan pada rapat internal komisi VIII DPR RI.

Selain itu, dalam sambutannya Ketua tim rombongan kunjungan kerja reses Komisi VIII menambahkan bahwa DPR RI ingin mendapatkan masukan secara langsung dari mitra kerja yang ada di Provinsi Kalimantan Timur

dan kota Balikpapan. Sehingga Komisi VIII DPR RI dapat mendapat gambaran secara *genuine* dari pemangku kepentingan yang terlibat aktif dalam perumusan kebijakan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Kemudian, Sesuai dengan tupoksinya dalam rangka persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji tahun ini Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1443 H/2022 M sebesar Rp39,8 juta atau naik sekitar Rp4,8 juta dibanding tahun BPIH tahun 2020. Namun kenaikan ini sama sekali tidak dibebankan kepada jemaah haji melainkan diambil dari nilai manfaat (*virtual account*) pengelolaan dana haji oleh BPKH.

Saya, Sebagai Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR RI telah berusaha untuk menetapkan BPIH serendah-rendahnya agar tidak memberatkan jemaah haji Indonesia, sekalipun komponen-komponen pemberangkatan jemaah haji seperti harga avtur naik luar biasa tinggi, termasuk juga adanya kenaikan akibat dari biaya protokol kesehatan.

Dengan komitmen yang tinggi dan kesungguhan para Anggota Komisi VIII DPR RI, kami terus mendesak Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, BPKH, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI dan Garuda Indonesia untuk menekan biaya serendah mungkin hingga akhirnya disepakati BPIH tahun ini sebesar Rp39,8 juta.

Setelah Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI menetapkan BPIH pada tahun ini, kami tentu berharap agar jajaran Kementerian Agama, termasuk Kanwil Kemenag Kaltim dan UPT. Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, untuk dapat segera mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan persiapan pemberangkatan haji dari Kaltim agar berjalan dengan baik dan lancar.

Setelah sambutan Ketua tim rombongan, acara di lanjutkan dengan Dialog dan tanya jawab:

Pada kesempatan pertama dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan masukan tentang validasi dan sinkronisasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di pusat dan daerah. Pendataan ini sangat penting untuk di *update* agar dapat di ketahui

siapa yang berhak menerima dan siapa yang sudah tidak berhak lagi menerima bantuan. Kedua, terkait bantuan santunan kepada anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena terkena Covid-19 pada tahun 2021 dengan memakai anggaran APBD sebesar Rp.3.050.000.000,- (*Tiga Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan rincian untuk 1.525 orang penerima. Ketiga, Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial agar tidak di hapuskan lagi untuk tahun berikutnya, untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam rangka memperkuat pelaksanaan program-program dari pusat ke daerah. Selanjutnya di beri kesempatan kepada Pendamping PKH. Pertanyaan yang di ajukan adalah terkait tali asih dan status Pendamping PKH, apakah di alihkan menjadi PPPK atau di berhentikan. Kesempatan ketiga di berikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang memberikan informasi bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Embarkasi Haji Balikpapan telah di pakai untuk isolasi terpadu warga yang terkena Covid-19 sebanyak 2.443 orang. Sejak 20 April 2022 Embarkasi Haji Balikpapan telah resmi di tutup untuk tempat isolasi dan di lanjutkan dengan program Vaksinasi dan Boster. Dan

kesiapan SDM tenaga Kesehatan untuk pemberangkatan Haji tahun 2022 semuanya telah di Vaksin.

B. PENINJAUAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) ASRAMA HAJI EMBARKASI BALIKPAPAN

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI selanjutnya di lanjutkan dengan peninjauan Asrama Haji Balikpapan di Gedung Zamzam di sambut oleh Kepala UPT Embarkasi Haji Balikpapan, Bapak, Haji. Mukhtar, S.Ag. Gedung yang dibangun dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2014 ini di lakukan untuk melihat secara langsung kesiapan Asrama Haji Balikpapan dalam mempersiapkan pelaksanaan ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M. Dengan melihat langsung kondisi asrama haji baik dari sisi infra dan supra struktur yang ada serta mengecek kelengkapan yang ada. Dengan peninjauan secara langsung ini, tim rombongan Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kondisinya gedung dan kamar jemaah yang tertata cukup rapih. Bahkan Ketua tim rombongan merasa kamarnya cukup membuat orang betah. Apalagi ada yang menghadap langsung ke pantai. Terkait penyelenggaraan haji tahun 2022 ini, Ketua tim rombongan meminta UPT Asrama Haji

Balikpapan bersiap diri untuk menyambut jemaah haji. Setelah 2 tahun tidak menjadi Embarkasi haji, asrama haji Balikpapan digunakan untuk isolasi terpusat di masa kasus Covid-19 tinggi. Penyelenggara haji juga harus betul betul siap, kemarin juga sempat dipakai ruang isoter. Kami juga memastikan program yang lain bisa terlaksana dengan baik terutama keagamaan. Kepala UPT Asrama Haji Balikpapan Mukhtar mengatakan pihaknya sudah siap, jika nanti akan digunakan kembali sebagai embarkasi/debarkasi haji. “Alhamdulillah sekarang gedung-gedung yang sebelumnya digunakan tempat isoter Covid-19 sudah di sterilisasi semua, jadi Insya Allah aman buat jemaah haji,

BAB III

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pertemuan dan peninjauan ke UPT Asrama Haji Balikpapan pada kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di peroleh temuan sebagai berikut :

1. Dalam penanganan bantuan santunan anak yatim dan piatu yang orang tuanya meninggal karena Covid-19

telah dilakukan pembayaran oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.3.050.000.000,- (*Tiga Miliar Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan rincian untuk 1.525 orang penerima.

2. Status dan tali asih untuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk di perjelas agar pendamping PKH tidak *ambigu* dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan.
3. Kuota jamaah haji untuk Provinsi Kalimantan Timur agar segera di tetapkan karena Pemerintah Pusat telah menetapkan Kuota Jamaan Haji Nasional pada tahun 1443 H/2022 M.
4. Sinkronisasi data keluarga penerima manfaat (KPM) agar terus di lakukan penyesuaian sebagai antisipasi terjadinya ketidaksesuaian data penerima manfaat dalam penyaluran bantuan sosial.

Sedangkan hasil pertemuan dari kegiatan kunjungan kerja reses ini dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dana Dekonsentrasi yang di peruntukan Dinas Sosial di daerah agar tetap di pertahankan untuk menunjang kinerja dalam melaksanakan program-program yang ada di daerah.

2. Membangun pola komunikasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada warga agar tidak terjadi mis persepsi terutama dalam penanganan bantuan dan santunan sosial bagi warga yang terkena dampak covid-19.
3. Surat Edaran Kementerian Agama RI dalam penetapan Kuota Jamaah Haji di Provinsi Kalimantan Timur untuk di prioritaskan dalam mempersiapkan pelaksanaan ibadah Haji tahun 1443 H/2022 M.
4. Mengusulkan kepada Kementerian Sosial RI agar memastikan status dan tali asih Pendamping PKH.

BAB. IV KESIMPULAN DAN PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja reses komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur di buat sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Mitra Kerja Komisi VIII DPR RI.

TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI

Dr. TB. ACE HASAN SYADZALY, M.SI
Ketua







Fasilitas UPT Embarkasi Asrama Haji Balikpapan dengan model kamar penginapan setara bintang tiga.

